

## Manajerial Keuangan dalam Pengelolaan Pajak berlandaskan Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Swasta di Semarang

Jaluanto Sunu Punjul Tyoso<sup>1\*</sup>, Amsar<sup>2</sup>, Elly Yulianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
Email Koresponden: [jaluanto@untagsmg.ac.id](mailto:jaluanto@untagsmg.ac.id)

**Abstract.** *This study analyzes financial management in a private company in Semarang through information management systems in payroll administration. The data were divided into five categories: general, finance, accounting, sales administration, and accounting. The analysis method used was information system analysis with five steps, including monitoring, business processes, task delegation, independent verification, and capture procedures. The business process involves several entities in the application of VAT, Income Tax Article 21, and Income Tax Article 23. The delegation of tasks is considered ineffective because the number of employees is not proportional to the volume of work, which has a negative impact on the company's revenue. Supervision is carried out by the payroll department to ensure data accuracy. Supporting factors for the use of information management systems include information technology, user-friendly systems, top management support, and employee expertise. Conversely, inhibiting factors include lack of funds, declining number of tax employees, and ineffective division of tasks. An independence verification process was also conducted to ensure compliance with the prevailing tax laws in Indonesia.*

**Keywords:** *business process, segregation of duties, supervision, accounting procedures, tax, independent verification.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis manajemen keuangan di perusahaan swasta Semarang melalui sistem manajemen informasi dalam administrasi penggajian. Data dibagi dalam lima kategori: umum, keuangan, akuntansi, administrasi penjualan, dan akuntansi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis sistem informasi dengan lima langkah, termasuk pemantauan, proses bisnis, pendelegasian tugas, verifikasi independen, dan prosedur penangkapan. Proses bisnis melibatkan beberapa entitas dalam penerapan PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Pendelegasian tugas dinilai tidak efektif karena jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan, yang berdampak negatif pada pendapatan perusahaan. Pengawasan dilakukan oleh bagian penggajian untuk memastikan keakuratan data. Faktor pendukung penggunaan sistem manajemen informasi meliputi teknologi informasi, sistem yang ramah pengguna, dukungan manajemen puncak, dan keahlian karyawan. Sebaliknya, faktor penghambat termasuk kurangnya dana, menurunnya jumlah pegawai pajak, dan pembagian tugas yang kurang efektif. Proses verifikasi independensi juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci:** proses bisnis, pemisahan tugas, *supervise*, prosedur akuntansi, pajak, verifikasi independen.

### 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang dipaksakan oleh undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ( UU RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ). Penerapan UU ini, di negara Indonesia adalah setiap perusahaan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. “UU RI No. 42 Tahun 2009 tentang PPN atas Penjualan Barang atau Jasa”, menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan telah

memenuhi persyaratan wajib melaporkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh DJP melalui self-assessment system untuk menghitung, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan secara mandiri (Mardiana, et al., 2016). Perusahaan perlu memahami sanksi perpajakan agar lebih tertib dan taat dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu, sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan kepada wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan (Mardiana et al., 2016).

Perusahaan Swasta merupakan perusahaan agen tunggal elevator & escalator di Semarang yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, artinya perusahaan ini mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Fenomena yang ada di Perusahaan Swasta adalah kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi. Perusahaan sering kali mendapat surat teguran dan surat tagihan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak setempat karena adanya kurang bayar atau telat melapor dan membayar. Persoalan lain yang dihadapi perusahaan adalah kesalahan hitung dan keterlambatan pelaporan terjadi karena pengelolaan data akuntansi perpajakan yang belum tersusun rapi. Selain itu, bagian pajak kurang pengalaman dalam menanganinya. Data akuntansi yang akan digunakan bagian pajak untuk menghitung dan membuat laporan SPT, seringkali masih terdapat di bagian lain dan belum dikembalikan, akibatnya terjadi salah hitung atau kurang bayar pada masa SPT yang bersangkutan.

Cahyadi, Mukhlisin & Pramono (2020) mempelajari peran dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem informasi akuntansi, dan hasilnya adalah dukungan manajemen puncak memainkan peran yang sangat penting dalam kualitas sistem informasi akuntansi yang diterima. Hal ini sesuai dengan Biwi, Atmaja, dan Darmawan (2015) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SIA. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak terhadap sistem informasi akuntansi merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem informasi di perusahaan. Penelitian (Tambe, Sunarya, & Yusuf, 2018) berbeda dengan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dukungan manajemen puncak tidak berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh Jaluanto SPT. (2015); Muhammad, Djumati, Hasan & Lombo (2019); Ermina, Rochmawati & Agung (2018) tentang sistem informasi penggajian yang diterapkan di perusahaan, dan hasilnya

menyatakan bahwa sistem informasi penggajian dan Pph Pasal 21 memberikan kemudahan pemrosesan gaji karyawan dan penghitungan gaji karyawan yang lebih efektif dan efisien..

Penelitian lainnya mengenai sistem informasi akuntansi yaitu pengelolaan kas. Perancangan sistem informasi akuntansi kas menghasilkan sebuah prototype yang dapat diimplementasikan lebih lanjut (Rahayu & Devitra, 2017; Endang Masitoh W., 2017; Sumarsono & Effendi Purnomo, 2019). Sementara itu, penelitian tentang sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh Nurochman, Wahyuni, & Kustono (2019); Widyastuti & Sahara (2018); dan Atmojo (2020) fokus penelitian pada penjualan dan pembelian. Penelitian lain mengenai sistem informasi akuntansi fokus penelitian pada pengendalian kualitas produk persediaan, yaitu oleh (Citra & Tanamal, 2019; Simanjuntak, 2020), menyatakan bahwa pengolahan data dengan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dapat menghasilkan informasi persediaan produk dengan cepat dan mengurangi resiko kesalahan. Hasil penelitian oleh Mawadah & Muchayatin (2018), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi untuk pengendalian kualitas produk dapat membantu bagian produksi, quality control, quality assurance, dan product control assurance dalam memenuhi standar kualitas.

Penelitian- penelitian di atas mengenai sistem informasi akuntansi, lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SIA, evaluasi penerapan SIA pada siklus penggajian, pembelian, penjualan, dan pengeluaran (kas). Penelitian yang terdahulu belum ditemukan penelitian sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan pajak perusahaan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dibahas mengenai pengelolaan pajak perusahaan dengan analisis sistem informasi akuntansi. Analisis sistem informasi akuntansi sebagai sarana untuk membantu penentuan pilihan keputusan alternatif terkait masalah-masalah keuangan atau akuntansi. Analisis sistem informasi akuntansi dapat mengurangi ketidakpastian penyelesaian masalah (pajak). Salah satu informasi penting yang biasanya diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan dan perpajakan oleh manajemen perusahaan adalah informasi akuntansi yang dihasilkan oleh aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan (Wahyuni & Sinarwati, 2017; Adzim, 2017; Faqihudin, 2010).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak sebelumnya, dengan memperhatikan struktur perusahaan, mekanisme perhitungan pajak terutang dan pembuatan laporan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem informasi akuntansi dalam mengelola pajak di Perusahaan Swasta

Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan sistem informasi akuntansi di Perusahaan Swasta Semarang.

## 2. LANDASAN TEORI

Hall (2007) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki fungsi mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada pengguna. Sistem informasi akuntansi menerima input keuangan dan non-keuangan yang dikenal sebagai transaksi untuk diubah melalui berbagai proses menjadi informasi keluaran yang diberikan kepada pengguna. Menurut (Jaluanto SPT., 2017), fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi adalah: mengumpulkan dan menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen, memiliki pengendalian internal yang memadai seperti sebagai sistem yang andal, operasi yang efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen serta menjaga aset organisasi.

Perancangan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi adalah kemampuan untuk menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengolahan data secara lebih cepat, tepat dan akurat (Jayinudin, 2017). Penerapan sistem informasi akuntansi dalam PP No. 65 Tahun 2010 tentang pengelolaan daerah berdasarkan standar akuntansi negara bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pajak melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi (Mas'ut & Masrura, 2018) . Sistem informasi akuntansi pengelolaan laporan keuangan dana pensiun dan pajak penghasilannya dapat menyediakan PPP Dapen yaitu bagian keuangan atau buku kas, dengan pengelola data seperti transaksi pendapatan dan pengeluaran, data investasi dan data aset berupa ringkasan dan laporan yang mudah diakses oleh pengguna (Dahlan, Sholeh, & Widyastuti, 2016).

Sistem informasi akuntansi pengelolaan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan memberikan kemudahan bagi bendahara dalam memasukkan informasi pegawai, mengolah gaji pegawai, mencari informasi pegawai, mencetak gaji pegawai pada setiap periode, serta dapat meminimalisir kesalahan pemasukan data, proses perhitungan gaji dan kesalahan lainnya (Muhammad et. al., 2019). Perancangan sistem informasi akuntansi kas membantu mempercepat pengelolaan data seperti buku kas umum, realisasi dan rincian anggaran, buku bank dan pajak (Rahayu & Devitra, 2017). Sebuah sistem informasi akuntansi terkomputerisasi untuk memfasilitasi keputusan bisnis, seperti analisis proses input dan output di area pembelian atau penyimpanan (Nurochman et al., 2019). Pengembangan

sistem informasi akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan di perusahaan tidak hanya dapat dipelajari dari segi pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi tercipta keselarasan dalam kaitannya dengan kebutuhan sistem bisnis yang kompleks seperti manajemen perpajakan (Penatari, Setiawan, & Suhardjanto, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan landasan penelitian kualitatif yang dirancang untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan dari semua penarikan ini. Penggunaan metode kualitatif karena masalahnya tidak unik, holistik, kompleks, dinamis dan bermakna, sehingga tidak mungkin memahami situasi sosial dengan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat bantu seperti tes, angket dan pedoman wawancara.

Prosedur pengumpulan data Observasi (non partisipan), yaitu dengan melakukan pengamatan alur kerja dan perilaku karyawan yang terlibat dalam pengelolaan pajak di Perusahaan Swasta Semarang. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait di Perusahaan Swasta Semarang untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam (in depth interview) tentang situasi dan fenomena yang terdapat pada perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam wawancara tersebut adalah Staf Admin Marketing, Staf Admin Invoice, Staf Finance, Staf Accounting dan Manager Keuangan. Karyawan tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pajak perusahaan di Perusahaan Swasta Semarang.

Dokumentasi, yaitu mengambil data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pajak. Triangulasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Teknik analisis yang digunakan meliputi:

#### **a. Proses Bisnis**

Rangkaian kegiatan operasional usaha yang berulang secara logis dihubungkan dengan menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengubah suatu objek untuk mencapai hasil yang ditentukan oleh pelanggan internal dan eksternal sehingga meningkatkan kinerja perusahaan (Jaluanto SPT., 2017).

## b. Pemisahan Tugas

Pembagian tanggung jawab fungsional pegawai untuk melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Pemisahan tugas digunakan untuk mencegah aspek negatif dari perilaku manusia. Orang membuat kesalahan atau kelalaian, dan kadang-kadang melakukan penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan. Pemisahan tugas juga membantu mendeteksi tindakan tersebut (Jaluanto SPT., 2017).

## c. Supervisi /Pengawasan

Bisnis mempekerjakan seseorang yang kompeten dan dapat dipercaya untuk melakukan pengawasan atau supervisi. Tugas pengawasan adalah mengatur dan mengendalikan segala kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan atau organisasi (Hall, 2009).

## d. Prosedur akuntansi

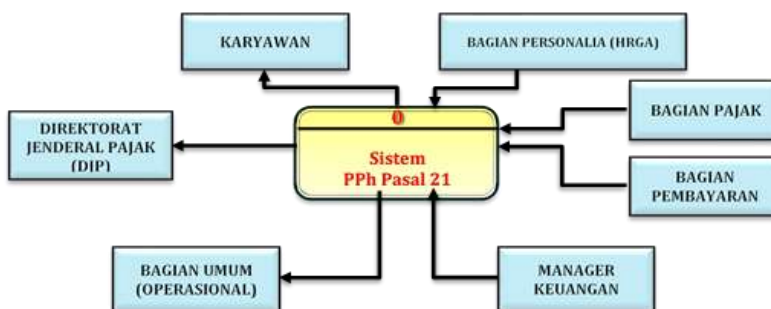
Bisnis memerlukan catatan akuntansi semua transaksi keuangan yang dapat mempengaruhi aset dan kewajiban diekspresikan dalam neraca dan pada laporan laba rugi. Perusahaan mengetahui kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari laporan keuangannya (Jaluanto SPT., 2017).

## e. Verifikasi Independen

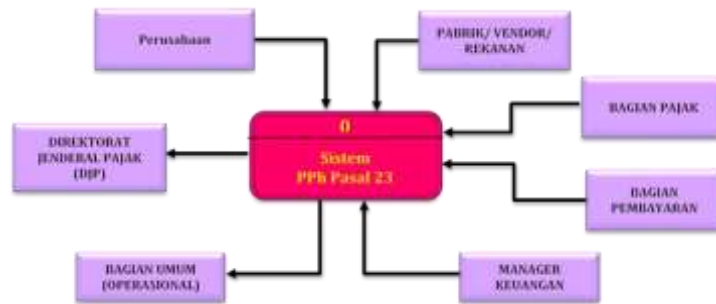
Kajian independen terhadap sistem informasi akuntansi dilakukan untuk meningkatkan dan memverifikasi keakuratan dan kelengkapan prosedur yang dilakukan oleh pihak lain dalam sistem (Hall, 2009).

## 4. PEMBAHASAN

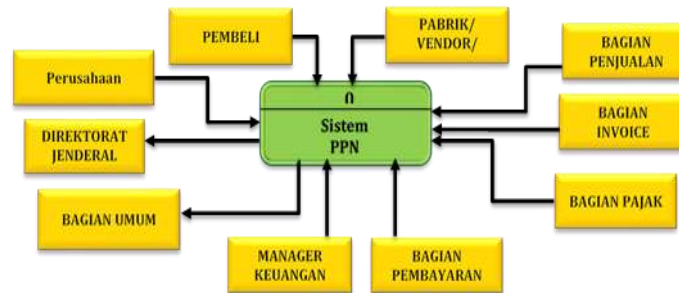
Pada bagian ini disajikan hasil penelitian mengenai implementasi sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan, yaitu dimulai dari proses bisnis dan diakhiri dengan menyajikan verifikasi independen. Tahapan-tahapan sistem informasi akuntansi yang dikaji adalah diagram context dan diagram arus data Pph Pasal 21 dan 23 serta PPN pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.



**Gambar 1.** Diagram Context Pph Pasal 21 (Hasil Penelitian diolah)



**Gambar 2.** Diagram Context Pph Pasal 23 (Hasil Penelitian diolah)



**Gambar 3.** Diagram Context PPN (Hasil Penelitian diolah)

### Proses Bisnis

Proses bisnis untuk mengelola pajak melibatkan beberapa entitas seperti berikut ini:

- Bagian personalia (HRGA) membuat rekap absensi dan gaji karyawan termasuk tunjangan yang diterima setiap bulannya.
- Bagian pajak akan menghitung beban pajak berdasarkan data yang diterima dari bagian personalia.
- Karyawan sebagai wajib pajak yang dikenakan potongan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- PPh 23 melibatkan pabrik/vendor/rekanan memotong penghasilan atas jasa yang timbul dari kegiatan perusahaan. Sedangkan, pihak tersebut dipotong karena perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas jasa yang timbul dari kegiatan bisnis bersama.
- PPN melibatkan bagian penjualan yang membuat rekap proyek, berita acara terkait perkembangan proyek. Selain itu juga melibatkan bagian invoice yang membuat rekap penjualan dan tagihan.
- Perusahaan juga terlibat dalam pengelolaan pajak ini baik sebagai wajib pajak yang mengeluarkan faktur pajak penjualan maupun sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.
- Bagian pembayaran membuat anggaran dan pelunasan pajak.



- h. Manager keuangan memberikan persetujuan anggaran, menandatangani laporan pajak, Bukti Pengeluaran Kas (BPK) serta cek untuk pembayaran pajak.
- i. Bagian umum (operasional) mencairkan cek dan menyetorkan pajak ke kantor pos atau bank.
- j. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memverifikasi laporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPN dan memberikan bukti pelaporannya.

### **Pemisahan Tugas**

Setiap bagian memiliki tugas yang berbeda-beda dan melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam *job description*. Fungsi pencatatan absen serta penggajian dilakukan oleh bagian personalia, sedangkan perhitungan pajaknya dilakukan oleh bagian pajak. Fungsi dari bagian invoice berbeda dengan fungsi dari bagian pajak. Fungsi perhitungan pajak berbeda dengan fungsi pembayaran. Begitu juga fungsi pembayaran pajak berbeda dengan manager. Pemisahan tugas ini dilakukan untuk menjamin keandalan laporan pajak/ SPT yang ada di perusahaan

Namun, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa bagian pajak selain mengerjakan pajak, juga memiliki tugas administrasi lainnya seperti membuat pencatatan akuntansi, mengecek anggaran, mengawasi piutang dan hutang, serta mengawasi pekerjaan administrasi lainnya. Banyaknya jenis pekerjaan yang dirangkap oleh bagian pajak menyebabkan perhitungan pajak yang salah, keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak sehingga berakibat DJP memberikan surat teguran dan surat tagihan pajak kepada perusahaan termasuk di dalamnya denda pajak yang harus dibayar.

### **Supervisi**

Bagian pajak dalam membuat perhitungan PPh Pasal 21 karyawan memerlukan data-data terkait penghasilan karyawan seperti yang tercantum dalam formulir 1721-A1. Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN diperlukan dokumen seperti faktur pajak, invoice, kwitansi, surat perjanjian, dan surat keterangan lainnya untuk dicocokkan dengan bukti potong PPh Pasal 23 dan faktur pajak terkait PPN. Perhitungan pajak dikerjakan oleh bagian pajak perlu dilakukan supervisi oleh manager keuangan untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayar dan dilaporkan telah sesuai dengan data yang sebenarnya. Supervisi tersebut dilakukan untuk memastikan data yang dibayar dan dilaporkan telah sesuai dengan sebenarnya.

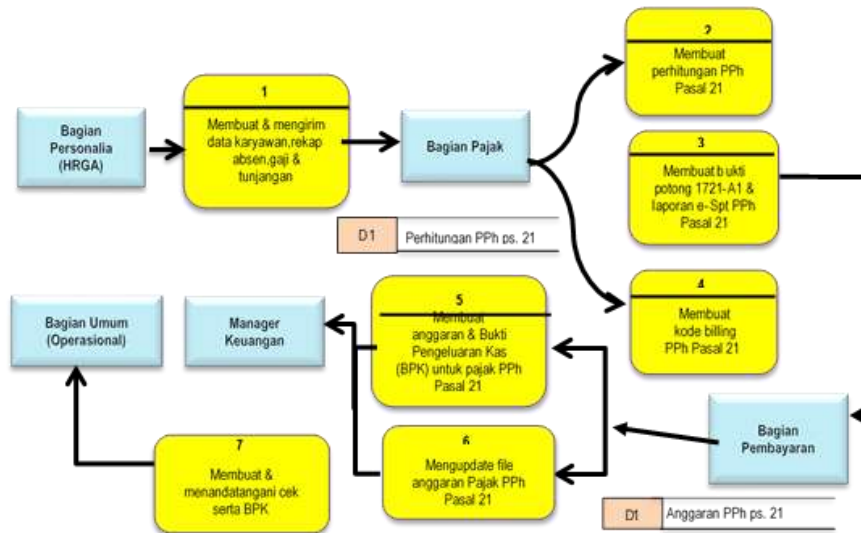
Bagian pajak selain mengerjakan pajak juga memiliki tugas untuk melakukan supervisi kepada bagian lainnya terkait administrasi. Sehingga pada tahapan ini terdapat



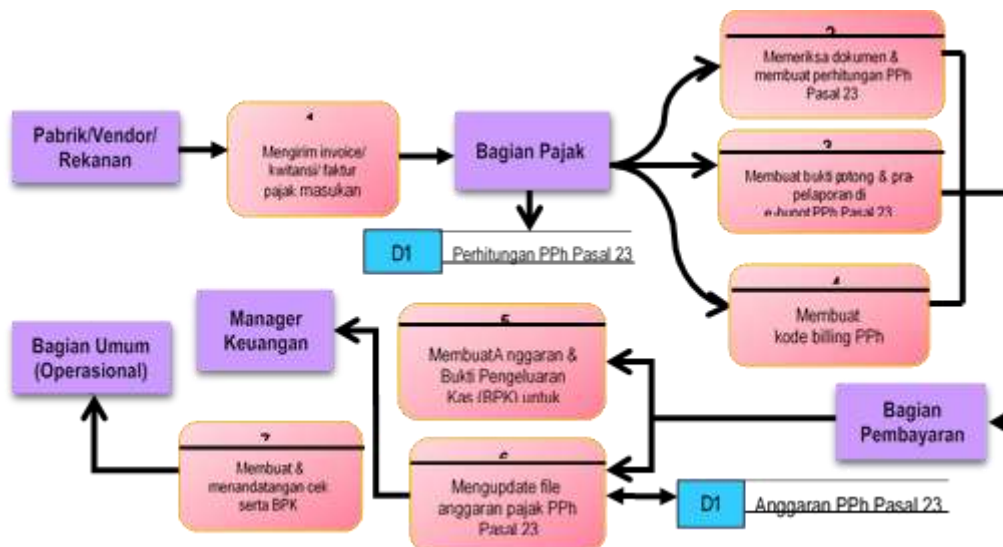
kendala yaitu memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan rutin karena juga harus membantu mengawasi bagian lainnya terkait administrasi perusahaan.

**Prosedur akuntansi**

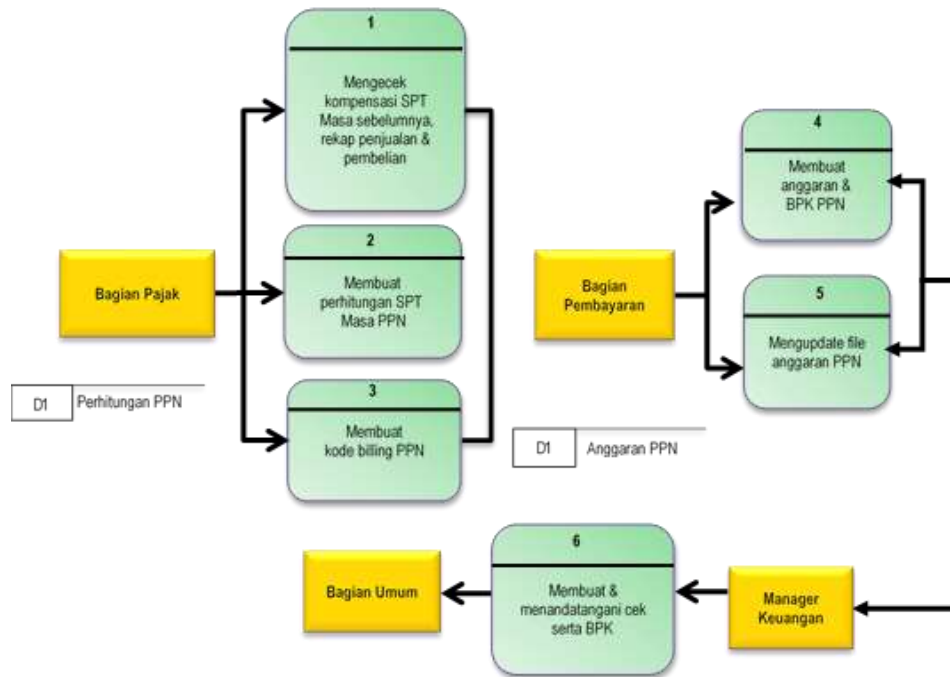
Prosedur akuntansi selanjutnya adalah pembayaran dan pelaporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diilustrasikan dengan diagram arus data seperti pada gambar 4 (PPh Pasal 21), gambar 5 (PPh Pasal 23), dan gambar 6 (PPN).



**Gambar 4.** Diagram Arus Data Pembayaran & Pelaporan PPh Pasal 21 (Hasil Penelitian diolah)



**Gambar 5.** Diagram Arus Data Pembayaran & Pelaporan PPh Pasal 23 (Hasil Penelitian diolah)



**Gambar 6.** Diagram Arus Data Pembayaran & Pelaporan PPN (Hasil Penelitian diolah)

Diagram arus data untuk prosedur akuntansi pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN, masing-masing entitas tersebut di atas memiliki tugas seperti berikut:

- Bagian umum (operasional) mencairkan cek dari anggaran yang telah disetujui ke bank dan membayarkan pajak dengan kode billing. Selanjutnya salinan penarikan cek dan BPK akan diserahkan ke bagian pembayaran untuk diarsip, sedangkan bukti setoran pajak diberikan ke bagian pajak.
- Bagian pajak menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera pada bukti setoran pajak ke aplikasi pajak PPH/ PPN. Kemudian bagian ini mencetak laporan serta bukti potongnya untuk diserahkan ke manager keuangan. Laporan SPT Masa PPH/ PPN yang sudah ditandatangani oleh manager keuangan discan dan dilaporkan ke situs <https://djponline.pajak.go.id> (PPH)/ <https://web-efaktur.pajak.go.id> (PPN). Bukti potong 1721-A1 diserahkan ke karyawan, sedangkan bukti potong PPh Pasal 23 diserahkan ke lawan transaksi sehubungan dengan pekerjaan jasa dari kegiatan usaha perusahaan.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memverifikasi laporan SPT Masa PPH dan PPN yang dilaporkan oleh perusahaan. Kemudian memberikan bukti pelaporan secara elektronik yang dapat diunduh pada situs <https://djponline.pajak.go.id> maupun email yang terdaftar pada DJP online.

## Verifikasi Independen

Dokumen dan persyaratan kelengkapan data dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN yang perlu diverifikasi sebagai berikut:

- a. Verifikasi independen pada pengelolaan PPh Pasal 21, dokumen seperti rekap absensi, daftar gaji termasuk tunjangan, daftar premi dan iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dari bagian personalia diverifikasi dan ditandatangani manager keuangan dan pimpinan sebelum dikirimkan ke bagian pajak. Verifikasi KTP dan KK yang masih berlaku dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dalam pengisian formulir 1721-A1 karyawan.
- b. Besaran PTKP yang dipakai untuk menghitung PPh Pasal 21 juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
- c. Bagian pajak memverifikasi BPK, dengan cara memeriksa dan membandingkan jurnal umum dengan jumlah yang diposting ke buku besar kas/ bank keluar dan buku besar gaji, tunjangan, dan iuran JHT.
- d. Sedangkan untuk pengelolaan PPh Pasal 23, dokumen yang diverifikasi adalah faktur pajak, kwitansi, atau dokumen lain untuk mencocokkan surat perjanjian kerjasama atau surat pendukung lainnya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dokumen tersebut harus dalam tahun yang sama.
- e. Verifikasi dokumen pada pengelolaan PPN antara lain bagian pajak melakukan verifikasi rekap progress proyek dengan mencocokkan data kontrak dan berita acara proyek.
- f. Faktur pajak penjualan perlu diverifikasi untuk memastikan bahwa data sudah sesuai dengan rekap penjualan dan rekap progres proyek.
- g. Faktur pajak masukan juga perlu diverifikasi agar data yang diterima sesuai dengan produk/ jasa yang diterima oleh perusahaan.
- h. Jumlah PPN yang menjadi kompensasi harus diverifikasi dengan bukti pelaporannya.
- i. Bagian pajak memverifikasi BPK, memeriksa jurnal terkait akun sehubungan dengan pekerjaan jasa yang dikenakan potongan tersebut.
- j. Bagian pembayaran memverifikasi cetakan kode billing untuk memastikan kebenaran identitas perusahaan, jenis setoran pajak, masa pajak, dan jumlah setoran pajak.
- k. Manager keuangan memverifikasi laporan perhitungan pajak, kode billing, dan BPK apakah sudah sesuai jumlah pajaknya.
- l. Bagian pajak juga memverifikasi bukti setoran pajak untuk memastikan kebenaran data dengan kode billing. Setelah melakukan laporan SPT Masa PPH dan PPN, bagian pajak

mencetak bukti pelaporannya dan memverifikasi data pelapor, masa laporan, serta tanggal pelaporannya.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung**

Keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak di Perusahaan Swasta Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat atau mendukung proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut beberapa faktor terkait penerapan sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan pajak di Perusahaan Swasta Semarang:

#### **a. Faktor Penghambat**

##### **1) Ketidaktersediaan dana untuk kantor cabang Semarang**

Perencanaan pengembangan sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan pajak yang belum didukung oleh anggaran perusahaan dapat menghambat proses pelaksanaannya, sehingga rancangan sistem informasi akuntansi ini belum dapat terealisasi dalam waktu dekat.

##### **2) Keterbatasan sumber daya manusia**

Jumlah tenaga kerja belum sepadan dengan volume pekerjaan khususnya pegawai yang menangani pajak perusahaan secara keseluruhan, tenaga kerja spesialisasi pajak. Bagian pajak selain mengerjakan pajak juga memiliki tugas lainnya seperti melakukan pencatatan akuntansi dan mengawasi pekerjaan bagian administrasi lainnya yang ada di perusahaan. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat menyebabkan adanya perangkapan tugas oleh bagian pajak.

##### **3) Pemisahan tugas yang belum efektif**

Fungsi pencatatan akuntansi, fungsi pajak, dan fungsi pengawasan terkait administrasi yang ada di perusahaan belum terpisah. Ketiga fungsi ini dikerjakan oleh satu bagian yaitu bagian pajak. Banyaknya pekerjaan yang dirangkap oleh bagian ini menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pada perhitungan maupun pelaporan SPT Masa PPh dan PPN, karena bagian ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

##### **4) Sistem informasi akuntansi belum terintegrasi dengan pengelolaan pajak**

Sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi antar bagian dapat menghambat pengelolaan pajak di perusahaan. Perubahan data akuntansi pada prosedur akuntansi seperti penghasilan karyawan, jasa kegiatan usaha, maupun

transaksi jual beli yang dilakukan oleh bagian lain belum terkoneksi dengan komputer bagian pajak, sehingga dapat menimbulkan terjadinya selisih besaran pajak yang seharusnya dibayarkan serta dilaporkan. Hal ini juga mengakibatkan munculnya perbedaan informasi yang dilaporkan perusahaan dengan lawan transaksinya.

## **b. Faktor Pendukung**

### **1) Teknologi informasi yang mendukung**

Teknologi informasi yang ada di perusahaan dapat mendukung kebutuhan sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak perusahaan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi individu maupun organisasi dalam melakukan pekerjaannya. Sistem operasi komputer dan antivirus yang ada di perusahaan upgrade sehingga dapat mendukung proses pengelolaan pajak. Perangkat keras (hardware) seperti komputer, printer, jaringan internet mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat mempermudah proses pengelolaan pajak dan dapat membantu bagian terkait dalam menyajikan laporan pajak perusahaan.

### **2) Sistem mudah dioperasikan oleh pengguna**

Sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan pajak dirancang dengan menyesuaikan peraturan pajak yang terbaru dan mudah digunakan oleh penggunanya. Sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan saat mengoperasikannya.

### **3) Persepsi owner & dukungan manajemen puncak**

Persepsi owner atas sistem informasi akuntansi merupakan gambaran yang dimiliki pimpinan tentang manfaat penggunaan SIA, perbandingan biaya dengan hasil yang diperoleh, dan kesiapan menerapkan SIA. Persepsi owner atas pengembangan sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan pajak ini juga memerlukan dukungan dari manajemen puncak yang ada di perusahaan.

### **4) Pengetahuan spesialis melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut bagi karyawan**

Penggunaan sistem informasi akuntansi pajak di perusahaan menuntut pengguna komputer (user) untuk meningkatkan keterampilan komputernya. Pengguna komputer (user) yang kompeten dapat mendukung terselenggaranya sistem informasi akuntansi administrasi perpajakan yang efektif. Keterampilan teknis yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman dalam menggunakan sistem meningkatkan kepuasan menggunakan sistem informasi akuntansi, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena pengguna

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Reward financial dan nonfinancial

- 5) Reward financial seperti bonus selain gaji jika pekerjaan selesai tepat waktu dan perusahaan tidak sering mendapat surat pajak/ atau bagian pajak dapat menyelesaikan masalah pajak akan diberi bonus agar semangat bekerja. Reward non financial dapat berupa liburan seperti family gathering. Hal ini berguna untuk memotivasi karyawan dan meminimalkan sikap malas di tempat kerja.

Perancangan sistem informasi akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mendukung pengelolaan pajak, sehingga hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Waluya & Dimas (2017). Namun, Lestari & Rustiana, (2019) menjelaskan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak tidak memerlukan persepsi *owner* melainkan tergantung pada proses belajar, motivasi, dan kepribadian pemilik itu sendiri.

Penelitian oleh Tambe, Sunarya, & Yusuf (2018) menghasilkan temuan bahwa dukungan manajemen puncak tidak berdampak pada implementasi sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian ini bahwa perusahaan membutuhkan dukungan manajemen puncak dalam implementasi sistem informasi akuntansi karena memberikan perhatian terhadap perhitungan dan penyelesaian pembayaran pajak. Selain itu, dibuatkan diagram arus data dan prosedur akuntansi untuk mengatasi masalah-masalah terkait kewajiban pajak perusahaan terhadap kas negara. Hal ini mendukung penelitian Cahyadi, Mukhlisin, & Pramono (2020) dan Biwi, Atmaja, & Darmawan (2015)

Pemisahan tugas yang belum efektif seperti fungsi pencatatan akuntansi dan fungsi pengawasan dalam penelitian ini belum dipisahkan dari fungsi pajak. Ketiga fungsi ini dikerjakan oleh satu bagian yaitu bagian pajak, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak,. Hal ini mendukung penelitian Endang Masitoh W. (2017), fungsi pencatatan akuntansi dan keuangan yang belum terpisah, dapat menimbulkan terjadinya kecurangan dan tidak keakuratan pada laporan keuangan dan pajak perusahaan

Sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak perusahaan pada penelitian ini secara komputerisasi belum terintegrasi sehingga dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak masih terdapat perbedaan informasi. Muhammad, et.al (2019); Ermina, et.al (2018); Simanjuntak, (2020) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi yang terintegrasi yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan sehingga perhitungan lebih efektif, efisien dan dapat mengurangi resiko kesalahan.

## 5. KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dijelaskan tersebut di atas pengelolaan pajak di Perusahaan Swasta Semarang, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut ini:

- a. Implementasi sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak di Perusahaan Swasta Semarang melalui 5 langkah sistem informasi akuntansi yaitu proses bisnis, pemisahan tugas, supervisi, prosedur akuntansi, dan verifikasi independen. Mekanisme dan entitas-entitas yang terlibat dalam pengelolaan pajak pada perusahaan ini dirancang dengan diagram context, diagram arus data, dan diagram alir dokumen.
- b. Proses bisnis untuk pengelolaan PPh pasal 21 terkait dengan transaksi penghasilan karyawan, PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa kegiatan usaha, dan PPN atas transaksi penjualan maupun pembelian. Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tersebut dilakukan oleh beberapa entitas yang terlibat langsung di dalamnya.
- c. Pemisahan tugas di Perusahaan Swasta Semarang untuk fungsi pencatatan akuntansi, fungsi pajak, dan fungsi pengawasan administrasi belum dipisahkan karena dikerjakan oleh satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang menangani pajak perusahaan belum sepadan dengan jumlah volume pekerjaannya.
- d. Supervisi terkait pekerjaan pajak dilakukan sebelum dan setelah pembayaran maupun pelaporan pajak oleh bagian pajak dan diperiksa oleh manager keuangan untuk menjamin kebenaran perhitungan dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan masalah seperti surat tagihan pajak atau teguran di kemudian hari.
- e. Prosedur akuntansi dalam pengelolaan pajak di Perusahaan Swasta Semarang digambarkan dengan diagram arus data dan diagram alir dokumen untuk mengilustrasikan tugas dari masing-masing entitas mulai dari input data sampai dengan output yaitu laporan pajak disertai bukti penerimaan laporan pajak dan bukti potong jenis pajak terkait.
- f. Verifikasi independen untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data akuntansi yang digunakan untuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak di Perusahaan Swasta Semarang. Verifikasi independen ini dengan memperhatikan Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia.



- g. Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak adalah tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan sistem informasi akuntansi, keterbatasan jumlah tenaga kerja (sumber daya manusia) khusus untuk menangani pajak, pemisahan tugas yang belum efektif, dan sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak yang belum terintegrasi. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mendukung dalam penerapan sistem informasi akuntansi untuk mengelola pajak di Perusahaan Swasta Semarang antara lain teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan, sistem informasi akuntansi yang mudah dioperasikan, persepsi *owner* dan dukungan manajemen puncak, keahlian yang dimiliki karyawan melalui pelatihan, pengalaman dalam urusan perpajakan, *reward financial* dan *non financial* untuk karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, F. (2017). Peranan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. *Perspektif*, 02(01), 173–179. Retrieved from [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif)
- Atmojo, S. T. (2020). Kemungkinan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Atas Aktivitas Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 201–209. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.709>
- Biwi, A., Atmaja, A. W. T., & Darmawan, N. A. S. (2015). Pengaruh Kapabilitas Personal dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pt. Tirta Mumbul Jaya Abadi Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Cahyadi, W., Mukhlisin, M., & Pramono, S. E. (2020). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(1), 66–76. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.2995>
- Citra, J. R., & Tanamal, R. (2019). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi untuk Perusahaan Garmen XYZ. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 2(2), 36. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v2i2.2732>
- Dahlan, P., Sholeh, M., & Widyastuti, N. (2016). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Pensiun (Studi Kasus : Dana Pensiun Pembina Potensi Pembangunan). *Jurnal SCRIPT*, 4(1), 37–47.
- Endang Masitoh W., D. S. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Prosedur Penerimaan & Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Andong Boyolali. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 140–144. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.91>

- Ermina, R., Rochmawati, & Agung, A. A. G. (2018). Sistem Informasi Akuntansi untuk Mengelola Kehadiran dan Penggajian Pegawai pada Usaha Koperasi. *Jurnal Telematika Edisi Industrial Engineering Seminar and Call for Paper (IESC)*, 102–108. Retrieved from <https://journal.ithb.ac.id/telematika/article/view/233/iesc2018>
- Faqihudin, M. (2010). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Pembuatan Keputusan Manajemen. *Permana*.
- Hall, James A (2007) Accounting Information Systems, Salemba Empat, Jakarta
- Jaluanto.SPT. (2015). *Pemanfaatan Sistem Merit pada Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian ( Studi Kasus pada PT Murba Jaya Abadi Semarang ) Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Murba Jaya Abadi Semarang dan*.
- Jayinudin, J. (2017). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Kecamatan Cileunyi Bandung Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 Dan Microsoft SQL Server 2000 Berbasis Client Server. *Is The Best [Accounting Information System & Information Technology Business Enterprise]*, 2(2), 288–300. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v2i2.1825>
- Lestari, N. A., & Rustiana, S. H. (2019). Pengaruh persepsi owner dan pengetahuan akuntansi dalam penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah di Pamulang. *Jurnal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 67–80.
- Manangin, M. R. U., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2016). Analisis Perhitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25 Pada PT. BPR Citra Dumoga Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 1025–1036.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja ). *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4).
- Mas'ut, & Masrura, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 29–37.
- Mawadah, Y., & Muchayatin. (2018). Pengembangan Model Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Untuk Pengendalian Kualitas Produk Pada PT . Lucky Textile Semarang II Di Semarang. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(1), 42–62.
- Muhammad, F., Djumati, K., Hasan, S., & Lombo, D. (2019). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI POTONGAN PAJAK PPh 21 MENGGUNAKAN VISUAL STUDIO PADA PT. YUSHINDO YASA PERKASA TERNATE. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 4(2), 67–77. <https://doi.org/10.36549/ijis.v4i2.59>
- Nurochman, B., Wahyuni, N. I., & Kustono, A. S. (2019). Rekonstruksi Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. NURTIWI. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11148>
- Penatari, R. I., Setiawan, D., & Suhardjanto, D. (2020). Dinamika Penelitian Sistem Informasi

- Akuntansi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 159–177.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.10>
- Rahayu, S., & Devitra, J. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Kas pada Satker PSP. TP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. *Manajemen Sistem Informasi*, 2(1), 360–378. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.11591/jurnalmsi.v12i4.xxxx%0A?>
- Simanjuntak, P. (2020). *Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dalam Menunjang Pengelolaan Persediaan Alat- Alat Medis di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias*. 4(3), 180–188.
- Sumarsono, E., & Effendi Purnomo, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.26623/v17i2.1452>
- Tambe, S. R., Sunarya, H., & Yusuf, A. (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor*. 5(2), 60–78.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/tuamf>
- Wahyuni, M. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Bagi Manajemen Pada KPN Werdhi Yasa Kecamatan Buleleng. *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Waluya, D., & Dimas, F. (2017). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Dan Umkm Berbasis Technopreneur. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Dan Umkm Berbasis Technopreneur*, 5(2), 1423–1440.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8124>
- Widyastuti, I., & Sahara, A. (2018). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat. *Moneter*, 5(2), 177–184. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>